

Analisis Data Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Oleh :

M. Arliyan Syahril, M.Pd,
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang kompleks, bukan hanya sekadar ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan rasa aman. Di Indonesia, desentralisasi otonomi daerah telah menempatkan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai ujung tombak dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, mereka menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjalankan peran ini.

Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, memegang peran yang sangat krusial dan strategis karena kedekatannya dengan masyarakat.

Tugas-tugas utama Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain adalah Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan – Regulator (Menyusun RPJMD-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD, Membuat Perda dan Perkada, Menyusun Data dan Peta Kemiskinan), Implementasi dan Pelaksanaan Program (Melaksanakan Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran, Menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan Akses ke Layanan Dasar), Koordinasi, Kolaborasi dan Fasilitasi lintas sektor, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pemberdayaan Kelembagaan Lokal.



Pemerintah Daerah yang memiliki peranan besar dan tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan harus melihat kemiskinan secara multidimensi dan terintegrasi. Pemerintah Daerah berhasil dalam penanggulangan kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan kebijakan, sinergi antar lembaga, akurasi data, dan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025 angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 3,12% ada penurunan sebesar 0,26% dengan garis kemiskinan di angka Rp. 598.545 dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,48 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12.

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, berbagai program dengan melakukan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor. Hasilnya angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS bisa berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana Tahun 2023 Kab. HSS di angka 4,01% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di Kab. HSS menjadi 3,38% dan terus turun di tahun 2025 dengan angka 3,12%.

Tahun 2024 merupakan penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir, dimana terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,63%, lalu pada tahun 2018 sebesar 0,59% dan pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,53%. Sedangkan tahun 2025 turun sebesar 0,26% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 598.545.

Kab. HSS pada tahun 2025 ini memiliki persentase kenaikan garis kemiskinan sebesar 2,57%, relatif kecil dan terkecil untuk Kab. HSS dalam 4 tahun terakhir.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. HSS dalam lima tahun terakhir (2021 – 2025) mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan indeks, tahun 2024 ada penurunan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan indeks bahkan lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kab. HSS mendapatkan nilai P1 sebesar 0,48 dan P2 sebesar 0,12 sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan nilai P1 sebesar 0,47 dan P2 sebesar 0,1.

Hal ini menandakan bahwa penduduk miskin semakin miskin secara ekonomi dan masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan. Serta semakin besar ketidakmerataan di antara penduduk miskin, artinya, ada penduduk miskin yang sangat jauh tertinggal dari yang lain.

Beberapa Langkah kebijakan yang dapat diambil dalam optimalisasi penanggulangan kemiskinan di daerah, adalah sebagai berikut

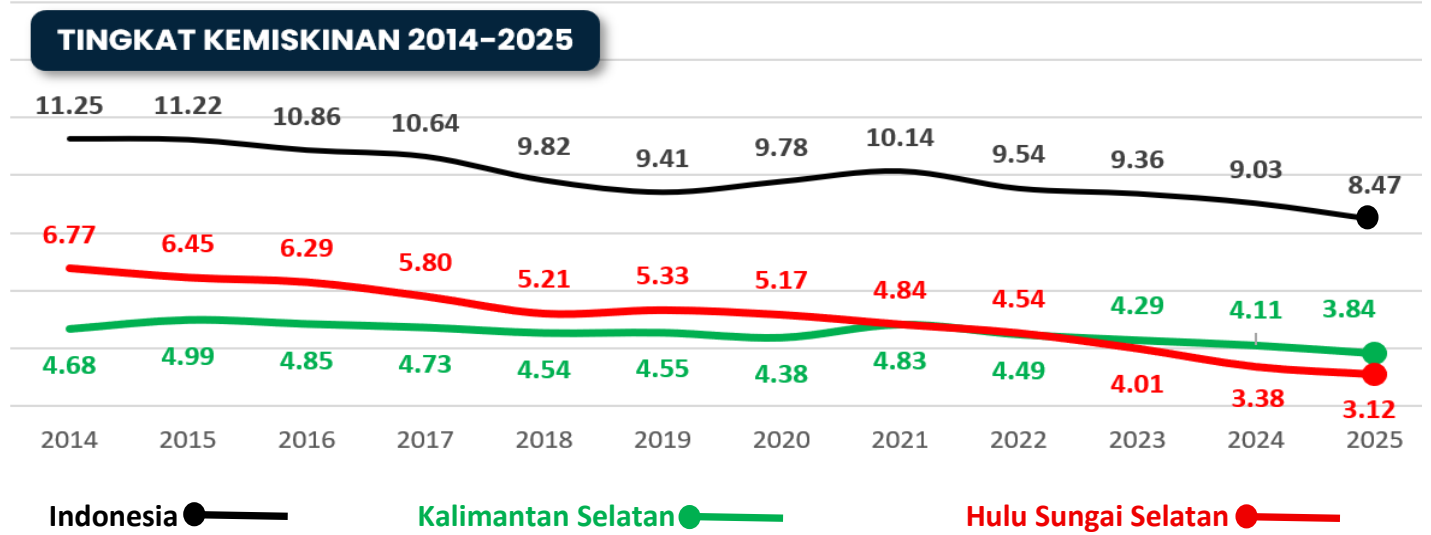
- Mengembangkan sistem data yang terpadu dan dinamis
- Pengintegrasian bantuan sosial dengan pelaksanaan pemberdayaan
- Evaluasi ketat P1 dan P2 (terutama terkait ketepatan sasaran bantuan)
- Pendekatan multidimensi berkelanjutan
- Melaksanakan langkah-langkah dalam menjaga garis kemiskinan agar stabil

TINJAUAN KEBIJAKAN

Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan bukan hanya penting, tetapi sangat mendesak dan krusial terutama ketika era otonomi daerah. Urgensi ini muncul dari beberapa faktor kunci yang menjadikan Pemerintah Daerah sebagai aktor yang paling strategis dan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga akarnya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pusat seringkali bersifat general dan seragam. Pemerintah Daerah memiliki peran urgent untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah.

Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan bertindak sebagai ujung tombak yang kontekstual, cepat, dan akurat. Pemerintah Daerah adalah jembatan antara kebijakan nasional yang makro dengan realitas mikro di lapangan pada tingkat daerah. Tanpa peran aktif, cerdas, dan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah, kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berisiko tinggi hanya menjadi wacana dan angka-angka statistik semata, tanpa mampu menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat miskin itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan akuntabilitas Pemerintah Daerah lebih khusus dalam pengabilan kebijakan penaggulangan kemiskinan adalah sebuah keniscayaan dalam perjuangan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, berbagai program dengan melakukan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor. Hasilnya angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS bisa berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan di angka 4,01% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi 3,38% dan terus turun di tahun 2025 dengan angka 3,12%.



Adapun kalau diurutkan tingkat kemiskinan dari yang terendah ke yang tertinggi seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2025 maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati posisi ke-4 angka tingkat kemiskinan terendah setelah Kabupaten Banjar, Tapin dan Tanah Laut. Adapun pada tahun 2024 posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di posisi Ke-3 terendah sedangkan pada tahun 2025 dikejar oleh Kabupaten Tanah Laut yang menempati posisi ke-3 menggeser Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus turun di posisi ke-4. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 3,12 % dengan tingkat penurunan kemiskinan sebesar 0,26%.

Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Se KalSel
(Maret 2024 dan 2025)
(Diurutkan dari terendah ke tertinggi)

Nama Kab/Kota	PO (%)		Diff* % poin
	2024	2025	
Banjar	2,36	2,74	0,38
Tapin	3,33	2,91	-0,42
Tanah Laut	3,74	3,00	-0,74
Hulu Sungai Selatan	3,38	3,12	-0,26
Tanah Bumbu	3,41	3,13	-0,28
Kota Banjar Baru	3,79	3,44	-0,35
Barito Kuala	4,36	4,31	-0,05
Kota Baru	4,45	4,39	-0,06
Kota Banjarmasin	4,58	4,52	-0,06
Balangan	4,87	4,64	-0,23
Tabalong	5,64	4,67	-0,97
Hulu Sungai Utara	5,75	4,81	-0,94
Hulu Sungai Tengah	5,81	5,03	-0,78

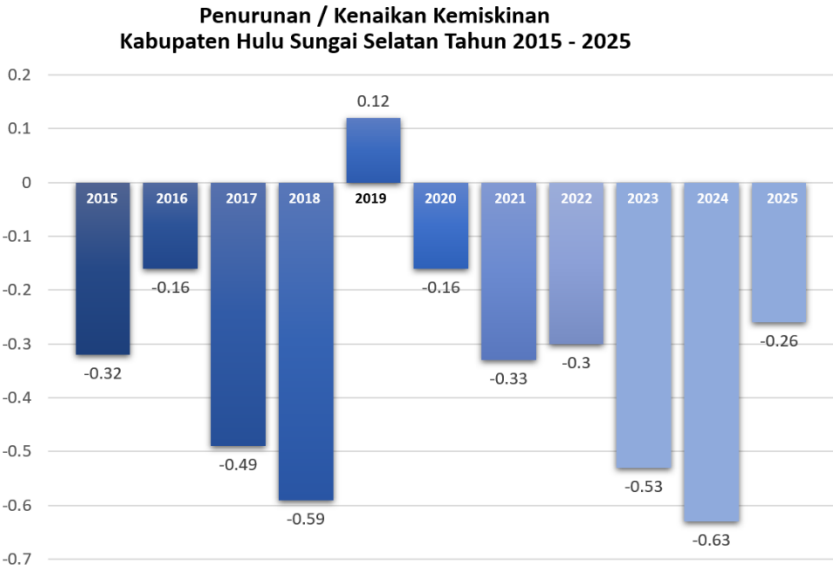
Tingkat Penurunan Kemiskinan Kab/Kota Se KalSel
(Maret 2024 dan 2025)
(Diurutkan dari tertinggi ke terendah)

Nama Kab/Kota	PO (%)		Diff* % poin
	2024	2025	
Tabalong	5,64	4,67	-0,97
Hulu Sungai Utara	5,75	4,81	-0,94
Hulu Sungai Tengah	5,81	5,03	-0,78
Tanah Laut	3,74	3,00	-0,74
Tapin	3,33	2,91	-0,42
Kota Banjar Baru	3,79	3,44	-0,35
Tanah Bumbu	3,41	3,13	-0,28
Hulu Sungai Selatan	3,38	3,12	-0,26
Balangan	4,87	4,64	-0,23
Kota Baru	4,45	4,39	-0,06
Kota Banjarmasin	4,58	4,52	-0,06
Barito Kuala	4,36	4,31	-0,05
Banjar	2,36	2,74	0,38

Pada tahun 2025 ini Kabupaten Tabalong menjadi Kabupaten yang memiliki tingkat penurunan kemiskinan tertinggi antara Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 0,97% sedangkan Kabupaten Banjar menjadi yang terendah karena malah terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,38%. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di posisi ke-8 dengan penurunan sebesar 0,26%.

Tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi, walaupun secara umum dari tahun ke tahun secara konsisten selalu terjadi penurunan angka kemiskinan. Bisa dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 hanya pada tahun 2019 yang tidak terjadi penurunan angka kemiskinan. Dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 0,12%.

Tahun 2024 merupakan penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir, dimana terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,63%, lalu pada tahun 2018 sebesar 0,59% dan pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,53%.



Selain persentase angka kemiskinan, maka Pemerintah Daerah juga penting untuk melihat jumlah penduduk miskin, yang tentu bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai variabel kunci yang membentuk karakter, skala, prioritas, dan bahkan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan itu sendiri.

Jumlah penduduk miskin secara langsung mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan dirancang. Jumlah yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang signifikan untuk program bantuan sosial (bansos), subsidi, dan program pemberdayaan. Jumlah yang tinggi juga memaksa pemerintah untuk membuat prioritas: mana yang paling mendesak seperti bantuan pangan atau pelatihan keterampilan. Sehingga jumlah penduduk miskin dengan data yang akurat akan sangat mempengaruhi kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk miskin dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu juga akan mempengaruhi besaran anggaran yang harus disediakan dan jenis program kebijakan yang akan dilaksanakan.

Adapun data jumlah penduduk miskin di Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah. Dimana jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kabupaten Tapin, yaitu sebanyak 5.770 orang dan yang paling banyak ada di Kota Banjarmasin sebesar 33.160 orang. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di urutan ke-3 terendah dengan besaran 7.550 orang.

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Se KalSel (Maret 2024 dan 2025)
(Diurutkan dari terendah ke tertinggi)

Nama Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Diff* (ribu orang)
	2024	2025	
Tapin	6,55	5,77	-0,79
Balangan	6,68	6,42	-0,26
Hulu Sungai Selatan	8,14	7,55	-0,60
Kota Banjar Baru	11,07	10,27	-0,80
Tanah Laut	13,40	10,83	-2,57
Hulu Sungai Utara	13,93	11,71	-2,22
Tabalong	14,97	12,50	-2,47
Tanah Bumbu	14,68	13,81	-0,87
Hulu Sungai Tengah	16,03	13,94	-2,09
Barito Kuala	14,04	13,97	-0,08
Kota Baru	15,98	15,89	-0,09
Banjar	14,46	16,92	2,46
Kota Banjarmasin	33,38	33,16	-0,22

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Se KalSel (Maret 2024 dan 2025)
(Diurutkan dari tertinggi ke terendah)

Nama Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Diff* (ribu orang)
	2024	2025	
Tanah Laut	13,40	10,83	-2,57
Tabalong	14,97	12,50	-2,47
Hulu Sungai Utara	13,93	11,71	-2,22
Hulu Sungai Tengah	16,03	13,94	-2,09
Tanah Bumbu	14,68	13,81	-0,87
Kota Banjar Baru	11,07	10,27	-0,80
Tapin	6,55	5,77	-0,79
Hulu Sungai Selatan	8,14	7,55	-0,60
Balangan	6,68	6,42	-0,26
Kota Banjarmasin	33,38	33,16	-0,22
Kota Baru	15,98	15,89	-0,09
Barito Kuala	14,04	13,97	-0,08
Banjar	14,46	16,92	2,46

Kalau dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025, maka penurunan jumlah penduduk miskin paling besar berada di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebanyak 2.570 orang dan Kabupaten Banjar malah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dengan bertambah sebanyak 2.460 orang. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di urutan ke-8 tertinggi penurunan jumlah penduduk miskin dengan besaran 7.550 orang.

Jumlah penduduk miskin dan kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki hubungan timbal balik. Jumlah penduduk miskin akan mempengaruhi kebijakan dalam penentuan skala, bentuk, jumlah anggaran, dan kompleksitas dari kebijakan yang dibuat. Begitupula kebijakan akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin: Kebijakan yang efektif akan menurunkan angkanya, sementara kebijakan yang buruk atau tidak tepat sasaran dapat membuat angka tersebut stagnan atau bahkan meningkat.

Sehingga data jumlah penduduk miskin yang akurat dan terpilah adalah landasan absolut bagi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Tanpa data yang baik, kebijakan berisiko besar menjadi sia-sia dan tidak menyentuh akar permasalahan.

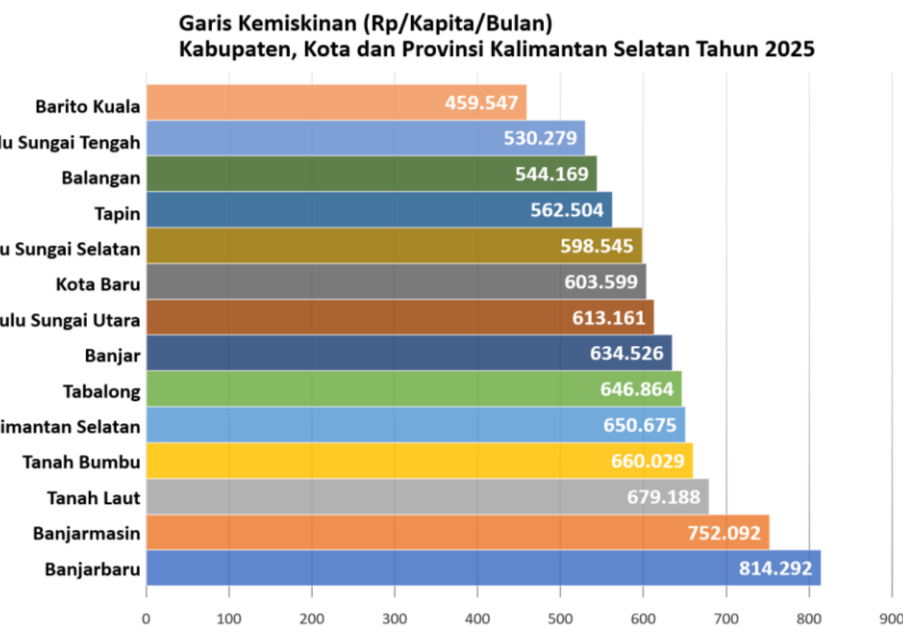
Selain tingkat kemiskinan ada angka yang juga menjadi alat ukur dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu “Garis kemiskinan”. Garis kemiskinan adalah nilai minimum pendapatan atau konsumsi yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dalam suatu negara pada suatu waktu. Garis kemiskinan adalah alat yang sangat penting dan tak tergantikan untuk mengukur, merencanakan, dan mengevaluasi program penurunan kemiskinan. Tanpanya, upaya penanggulangan kemiskinan akan berjalan buta tanpa arah dan target yang jelas.

Pada tahun 2025 garis kemiskinan tertinggi di Kabupaten / Kota se-Kalimantan Selatan ada di Kota Banjarbaru dengan besaran Rp. 814.292. Sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Barito Kuala dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 459.547.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 ini menempati posisi ke-5 terendah se-Kalimantan Selatan dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 598.545. Berada di bawah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tapin.

Secara sederhana Pemerintah Daerah kemiskinan untuk dapat mengalokasikan mengetahui berapa banyak orang yang mereka keluar dari kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten / Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan dalam rentang tahun 2021 – 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase yang berbeda-beda. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan garis kemiskinan di tahun 2025 ini sebesar 2,57%, sedangkan Kabupaten Tapin hanya naik sebesar 0,25%. Adapun Kabupaten Banjar mengalami kenaikan garis kemiskinan tertinggi sebesar 7,70%.



Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025 (Rp/Kapita/Bulan)					
Kab/Kota/Prov- Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Tanah Laut	537,854	575,061	620,532	670,062	679,188
Kota Baru	481,452	505,601	556,962	592,230	603,599
Banjar	482,867	514,991	561,521	589,165	634,526
Barito Kuala	355,160	375,707	417,110	437,579	459,547
Tapin	459,160	484,113	516,532	561,101	562,504
Hulu Sungai Selatan	494,203	516,857	547,855	583,549	598,545
Hulu Sungai Tengah	425,438	444,331	475,655	513,950	530,279
Hulu Sungai Utara	501,994	526,919	561,429	597,894	613,161
Tabalong	542,800	573,018	615,912	637,132	646,864
Tanah Bumbu	530,568	557,500	619,249	643,652	660,029
Balangan	453,928	476,190	508,157	528,104	544,169
Kota Banjarmasin	606,330	651,383	708,617	743,872	752,092
Kota Banjar Baru	653,556	692,830	753,899	781,405	814,292
Kalimantan Selatan	519,150	553,073	604,266	632,739	650,675

Persentase Kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2025 (%)				
Kab/Kota/Prov- Tahun	2022	2023	2024	2025
Tanah Laut	6.92	7.91	7.98	1.36
Kota Baru	5.02	10.16	6.33	1.92
Banjar	6.65	9.04	4.92	7.70
Barito Kuala	5.79	11.02	4.91	5.02
Tapin	5.43	6.70	8.63	0.25
Hulu Sungai Selatan	4.58	6.00	6.52	2.57
Hulu Sungai Tengah	4.44	7.05	8.05	3.18
Hulu Sungai Utara	4.97	6.55	6.50	2.55
Tabalong	5.57	7.49	3.45	1.53
Tanah Bumbu	5.08	11.08	3.94	2.54
Balangan	4.90	6.71	3.93	3.04
Kota Banjarmasin	7.43	8.79	4.98	1.11
Kota Banjar Baru	6.01	8.81	3.65	4.21
Kalimantan Selatan	6.53	9.26	4.71	2.83

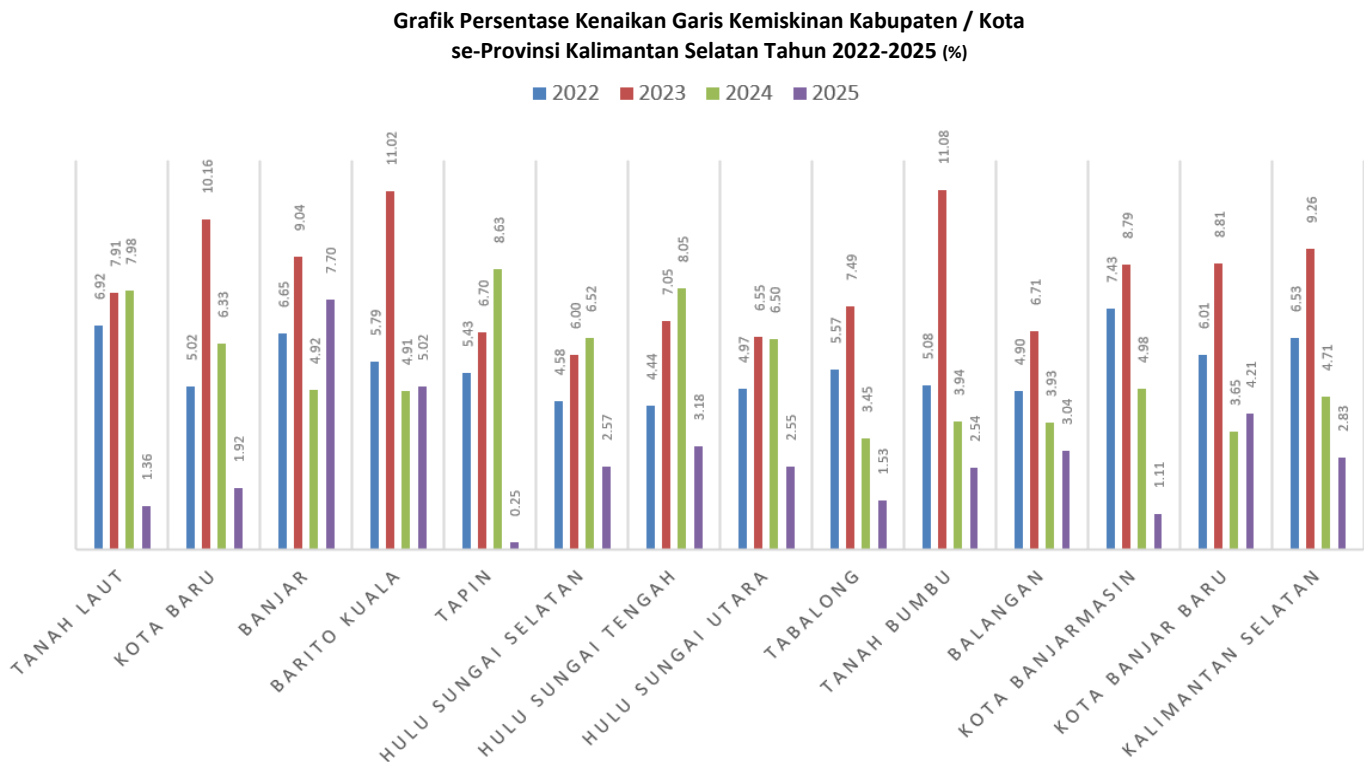
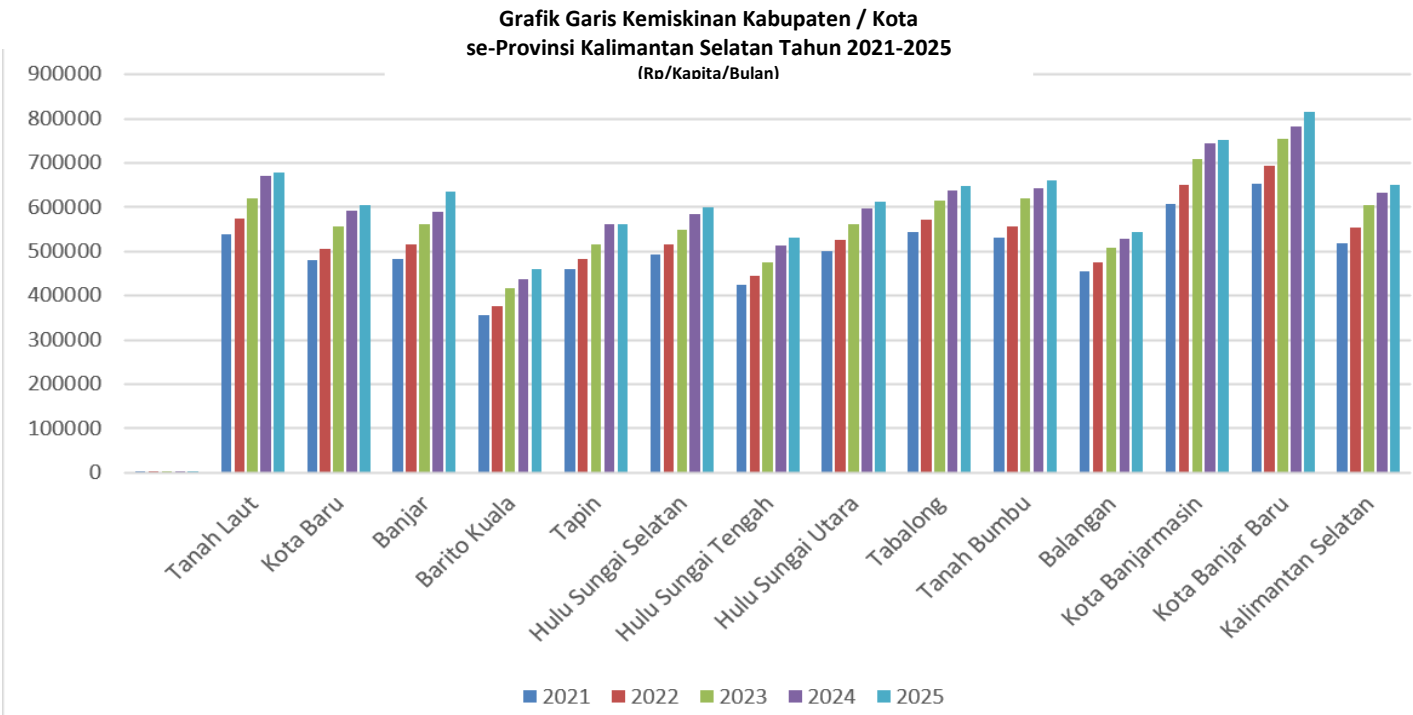
Persentase kenaikan garis kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan angka kemiskinan melonjak secara dramatis. Hal ini adalah efek yang paling langsung dan terlihat dengan adanya kenaikan garis kemiskinan, dan lebih banyak orang yang secara statistik masuk ke dalam kategori miskin. Bagitupula dengan seseorang yang sebelumnya dianggap "hampir miskin" (hanya sedikit di atas garis) tiba-tiba tercatat sebagai miskin.

Persentase kenaikan garis kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan atau perlambatan penurunan kemiskinan di daerah, hal ini terlihat pada tahun 2025 untuk Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Dimana Kabupaten Banjar pada tahun 2025 merupakan Kabupaten tertinggi dalam persentase kenaikan garis kemiskinan, sebesar 7,70% dan dampaknya angka kemiskinannya di tahun 2025 meningkat menjadi 2,74% (sebelumnya di Tahun 2024 sebesar 2,36% artinya ada peningkatan sebesar 0,38%).

Bagitupula dengan Kabupaten Barito Kuala persentase kenaikan garis kemiskinan, sebesar 5,02% dan dampaknya angka kemiskinannya di tahun 2025 penurunannya melambat dimana di tahun 2024 sebesar 4,36% dan tahun 2025 menjadi 4,31%, atau hanya turun 0,05%.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 ini memiliki persentase kenaikan garis kemiskinan, sebesar 2,57%, relatif kecil dan terkecil untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 4 tahun terakhir. Sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dimana di tahun 2024 sebesar 3,38% dan tahun 2025 menjadi 3,12%, atau turun sebesar 0,26%.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 tahun terakhir grafik garis kemiskinannya relatif menengah kalau dibandingkan dengan Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Selatan dan bahkan dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Namun kalau dibandingkan dengan Kabupaten tetangga seperti Tapin dan Hulu Sungai Tengah maka garis kemiskinan Hulu Sungai Selatan relatif tinggi.



Namun dibalik semua itu ketergantungan yang berlebihan pada garis kemiskinan dapat menyederhanakan masalah kemiskinan yang kompleks menjadi sekadar soal pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, penggunaan garis kemiskinan yang paling efektif adalah ketika ia dipadukan dengan indikator kemiskinan multidimensi yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, strategi penurunan kemiskinan menjadi lebih komprehensif, tidak hanya mengenai pendapatan dan pengeluaran tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Walaupun begitu, tetap penting bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menjaga garis kemiskinan stabil dan tidak mengalami kenaikan secara drastis dan tinggi. Upaya dalam menjaga garis kemiskinan agar stabil dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat menempuh beberapa langkah strategis yang berfokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan daya beli masyarakat, serta penguatan jaring pengaman sosial. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- a. Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah
Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis (beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang, daging). Memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar mampu mengantisipasi lonjakan harga terutama saat musim paceklik, hari besar keagamaan, atau gejolak pasar global. Serta menjalin kerja sama antar-daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran distribusi barang dari daerah surplus ke daerah defisit.

- b. Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja
Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program padat karya produktif untuk membuka lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpendapatan rendah. Mendukung UMKM dan ekonomi kreatif dengan kemudahan perizinan, akses modal, pelatihan, dan digitalisasi pemasaran. Serta mendorong investasi daerah yang padat karya, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.
- c. Penguatan Jaring Pengaman Sosial.
Langkah ini dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran (beras, pangan non-tunai, bantuan tunai bersyarat). Meningkatkan akses masyarakat miskin pada layanan dasar: pendidikan gratis, kesehatan murah/berbasis BPJS, dan bantuan perumahan layak huni dan memberikan subsidi transportasi, listrik, atau air bersih bagi rumah tangga miskin agar tidak terbebani pengeluaran tinggi.
- d. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Energi Lokal
Mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk pertanian/ternak/ikan. Serta mengembangkan lumbung pangan desa untuk menjaga ketersediaan pangan dengan harga stabil, dengan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih.
- e. Pemantauan dan Data Terpadu
Memperkuat Basis Data Terpadu (BDT) agar program perlindungan sosial tepat sasaran, serta melakukan monitoring rutin terhadap indikator kemiskinan (garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi) dan menjalin kerja sama dengan BPS, perguruan tinggi, dan LSM untuk mengkaji tren kemiskinan dan solusi jangka panjang.

Menjaga garis kemiskinan tetap stabil membutuhkan kombinasi antara pengendalian harga, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial. Bila tiga hal ini berjalan serentak, maka risiko kenaikan garis kemiskinan yang tajam dapat ditekan dan berdampak besar dalam usaha penanggulangan kemiskinan di daerah.

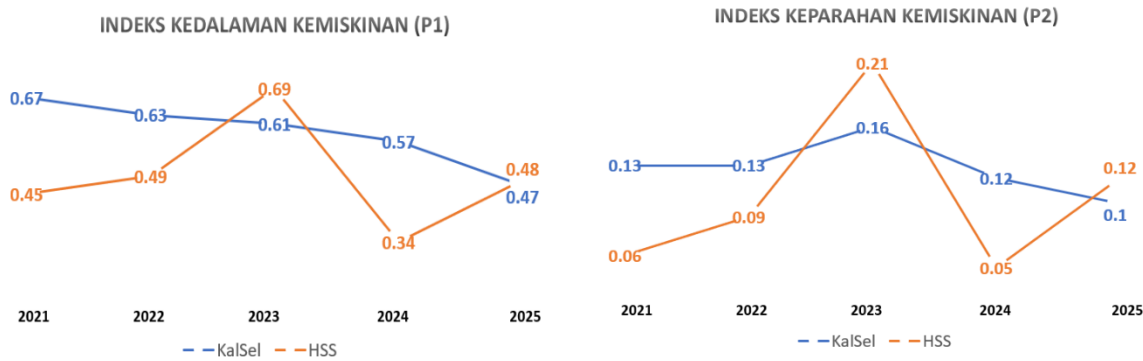
Sekian banyak data tentang kemiskinan tadi, maka dalam penanggulangan kemiskinan juga ada dikenal dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Kalau angka/tingkat kemiskinan (persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) disebut dengan P0 atau *Head Count Index*, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan disebut dengan P1 atau *Poverty Gap Index* dan Indeks Keparahan Kemiskinan disebut dengan P2 atau *Poverty Severity Index*.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, menunjukkan "kedalaman" kesulitan ekonomi mereka. Sebuah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap individu penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, yang berarti mereka semakin miskin secara ekonomi dan menunjukkan masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan.

Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan bobot lebih pada mereka yang pengeluarannya lebih jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga menunjukkan seberapa besar ketimpangan atau "keparahan" di antara penduduk miskin itu sendiri. Indeks ini mengukur penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dengan memberikan bobot lebih pada penduduk yang pengeluarannya jauh dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketidakmerataan atau ketimpangan di antara penduduk miskin, artinya, ada penduduk miskin yang sangat jauh tertinggal dari yang lain.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun terakhir (2021 – 2025) mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan indeks, tahun 2024 ada penurunan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan indeks.

Patut diapresiasi adalah apa yang terjadi di tahun 2024, dimana angka kemiskinan di tahun 2024 adalah 3,38% turun sebesar 0,63% (tahun 2023 angka kemiskinan sebesar 4,01 %). Penurunan kemiskinan tahun 2024 ini merupakan penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Walaupun di tahun 2024 persentase kenaikan garis kemiskinan cukup tinggi yaitu sebesar 6,52%. Bahkan di tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks paling rendah selama lima tahun terakhir, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,34 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,05.



Pada tahun 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan, dan bahkan lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai P1 sebesar 0,48 dan P2 sebesar 0,12 sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan nilai P1 sebesar 0,47 dan P2 sebesar 0,1. Kenaikan nilai indeks ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) khususnya di tahun 2025 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan setidaknya memberikan peringatan bahwa penduduk miskin semakin miskin secara ekonomi dan menunjukkan masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan (P1) dan semakin besar ketidakmerataan atau ketimpangan di antara penduduk miskin, artinya, ada penduduk miskin yang sangat jauh tertinggal dari yang lain. Serta menunjukkan bahwa ada sekelompok penduduk miskin yang sangat kekurangan, tidak hanya sedikit di bawah garis kemiskinan, tapi sangat jauh dari garis tersebut (P2).

Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga yang bertanggung jawab atas penghitungan dan publikasi data kemiskinan mengukur kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang mengacu pada standar global dan berfokus pada ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Analisis yang hanya berfokus pada indikator penurunan angka kemiskinan (P0) dapat memberikan gambaran yang menyesatkan tentang perbaikan kesejahteraan. Jika penurunan P0 tidak diiringi oleh penurunan P1 dan P2 yang signifikan, hal itu bisa menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan hanya berhasil menyentuh kelompok yang hampir miskin dan gagal memperbaiki kondisi kelompok miskin ekstrem yang paling membutuhkan. Fenomena ini mengisyaratkan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme kebijakan, di mana intervensi tidak secara efektif menjangkau atau meningkatkan kondisi mereka yang berada di paling bawah.

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja membuahkan hasil yang efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, serta berhasil memperbaiki kualitas sumber daya manusia di kalangan keluarga miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, misalnya, juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, terutama di perdesaan.

Namun ketika ada kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa dana yang seharusnya mengurangi kesenjangan pengeluaran dan ketimpangan di antara orang miskin justru mengalir ke kelompok yang tidak berhak, sehingga memperparah ketimpangan sosial dan membatasi dampak program pada mereka yang paling terpinggirkan. Selain itu, beberapa studi juga menyoroti adanya risiko ketergantungan penerima pada bantuan sosial, yang menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang.

Beberapa Langkah kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pada penanggulangan kemiskinan di daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Sistem Data yang Terpadu dan Dinamis
Terpadu dan Dinamis adalah kunci dalam pengelolaan data. Optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diinisiasi Pemerintah Pusat. Hal ini dapat diakselerasi dengan Aplikasi Lindungi Warga (Liwat) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sistem yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa setiap program bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau kelompok dengan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) tertinggal.
- b. Pengintegrasian Bantuan dengan Pemberdayaan
Strategi penanggulangan kemiskinan harus bertransisi dari paradigma bantuan berbasis konsumsi semata ke program yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Program bantuan tunai, seperti PKH, harus berfungsi sebagai jembatan untuk transisi penerima ke program peningkatan kapasitas, seperti Kartu Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Model ini akan mendorong kemandirian dan menghilangkan risiko ketergantungan, karena penerima bantuan didorong untuk mengembangkan keterampilan dan mengakses permodalan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini juga akan meminimalisir efek dan risiko ketergantungan penerima pada bantuan sosial.
- c. Evaluasi Ketat P1 dan P2
Tujuan akhir dari upaya penanggulangan kemiskinan harus melampaui statistik P0 semata. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus menjadikan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indikator keberhasilan utama. Hal ini akan mencerminkan komitmen untuk tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga untuk secara nyata memperbaiki kondisi dan menutup kesenjangan di antara mereka yang paling rentan. Ketepatan sasaran bantuan untuk warga miskin yang sangat membutuhkan akan sangat berdampak pada capaian nilai indeks.
- d. Pendekatan Multidimensi Berkelanjutan
Melakukan pendekatan multidimensi yang berfokus pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan permodalan, agar tercipta perbaikan kesejahteraan yang nyata dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
- e. Melaksanakan langkah-langkah dalam menjaga garis kemiskinan agar stabil.

